

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP KUMULASI GUGATAN CERAI  
DENGAN HARTA BERSAMA**

**(Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor  
1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh**

**Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIVAN INDRA SANTOSO**

**NIM. 0910111045**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP KUMULASI GUGATAN CERAH DENGAN  
HARTA BERSAMA (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor  
1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)**

Oleh :

**RIVAN INDRA**

NIM. 0910111045

Disetujui pada tanggal: 11 Desember 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Rachmi Sulistyarini, SH.MH**

NIP. 196111121986012001

**M. Hamidi Masykur, SH.MKn**

NIP. 198004192008121002

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Djumikasih, SH.MH**

NIP. 197211301998022001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rivan Indra Santoso  
NIM : 0910111045  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/ Konsentrasi : Hukum Perdata  
Jenis Karya : Skripsi/ Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP KUMULASI GUGATAN CERAI DENGAN HARTA BERSAMA( Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang

Pada tanggal : 27 Februari 2015

Yang menyatakan,

(Rivan Indra Santoso)

# ANALISIS NORMATIF TERHADAP KUMULASI GUGATAN CERAI DENGAN HARTA BERSAMA

( Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor  
1137/Pdt.G/2010/PA.Sit)

**Rivan Indra, Rachmi Sulistyarini, M.Hamidi Masykur**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**E-mail: indrarivan@gmail.com**

## Abstrak

Berakhirnya ikatan perkawinan itu tidak serta merta tanpa menimbulkan persoalan baru, biasanya persoalan-persoalan baru yang menyertainya adalah masalah hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak ataupun masalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan. Atas dasar tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit., yang menarik adalah adanya perubahan dalil-dalil gugatan Penggugat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil dari penelitian ini diketahui Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo dari perubahan gugatan tersebut ada penambahan pokok gugatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 RV. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak gugatan kumulasi Penggugat Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Bersama dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo ditinjau dari Hukum Perceraian sudah sangat tepat karena penggabungan gugatan dilakukan yaitu di dalam perubahan gugatan, yang pada awalnya gugatan tersebut hanya sebatas perceraian sementara itu pada perubahan gugatannya menjadi gugatan perceraian dan pembagian serta penguasaan harta bersama sehingga hal ini membuat positanya berubah dan sudah berkenaan dengan materi perkara, maka tentu saja dasar pertimbangan hakim untuk menerima eksepsi Tergugat adalah sudah sangat tepat dan sudah sesuai dengan Pasal 127 Rv.

*Kata kunci:* Perceraian, PerubahanGugatan, HartaBersama.

## Abstract

Get finally that matrimony not at moment's notice without incurring new problem, usually new problems that espouses it is rights problem mother child if of yielding their marriage were gifted child or problem even community property one that

acquired up to marriage term. On a basic aforesaid, writer most draw considerable study about the plaint theorem changes Plaintiffs on Religion Justice Verdict Situbondo Number 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit. This observational type is observational normatif with approaching in observational it is case approaching (Case Approach). Result of this research is acknowledged changing The Plaint that did by Plaintiff in Number verdict 1137/Pdt.G/2010/ PA.Sit at Situbondo's Religion Justice of that the plaint change available thes plaint subject increase, so that thing in opposition to Section 127 Rv. Judge judgment basic in Refuse merging the plaint Plaintiff About separate and Division Community Property in Number verdict 1137 / Pdt. G / 2010 / PA. Sit at Situbondo's Religion Justice is sighted from separate Law was felicitous because the plaint merging is done which is in the plaint change, one that in the beginning that the plaint just one bounds of meanwhile separate on changed its the plaint becomes separate the plaint and division and community property mastery so it makescharge basic changed and have about material takes proceedings, therefore indeed judge judgment basic to accept criticised exception is was felicitous and corresponded to Section 127 Rv.

*Key words:* Divorced, Changing Lawsuit Material, Marital Assets.

## **PENDAHULUAN**

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah, namun tidak semua perkawinan itu bisa langgeng. Ketidakharmomisan dalam rumah tangga menjadi penyebab pecahnya bahtera rumah tangga. Janji-janji suci perkawinan sudah dilupakan dan menjadi petaka dengan berakhirnya ikatan perkawinan,

Berakhirnya ikatan perkawinan itu tidak serta merta tanpa menimbulkan persoalan baru, biasanya persoalan-persoalan baru yang menyertainya adalah masalah hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak ataupun masalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan. Sering kita dengar tentang bagaimana hak pengasuhan anak diperebutkan oleh pasangan suami-isteri yang akan bercerai. Atau pun persoalan harta bersama yang jadi rebutan. Bahkan kedua persoalan tersebut belumlah tuntas sampai berlarut-larut. Sehingga membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pengasuhan hak anak dan pembagian harta bersama.

Berbicara masalah pembagian harta bersama antara pasangan suami isteri yang sudah bercerai maka pembagiannya telah diatur di dalam Pasal 97 Kompilasi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Bertitik tolak dari hal tersebut, terkadang gugatan pembagian harta bersama diajukan bebarengan dengan Gugatan Perceraian (kumulatif gugatan), namun ada juga gugatan pembagian harta bersama yang diajukan terpisah dari gugatan perceraian, bahkan terkadang penggabungan gugatan selain gugatan cerai dan pembagian harta bersama juga berkenaan dengan Hak pengasuhan Anak. Pengajuan Gugatan secara kumulatif yaitu antara gugatan cerai dan pembagian harta bersama dibenarkan menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 86 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Atas dasar tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Perkara Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit., yang menarik adalah adanya perubahan dalil-dalil gugatan Penggugat secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan.

Perubahan gugatan perdata masih dimungkinkan terjadi dan dapat dibenarkan sebelum Hakim membacakan gugatan di dalam persidangan, dan belum terjadi proses jawab-jawab, hal itu merujuk kepada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1425 K/Sip/1985 Tanggal 24 Juni 1991. Adapun bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1425 K/Sip/1985 Tanggal 24 Juni 1991

"Perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan gugatan di dalam persidangan,

dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut".<sup>1</sup>

## **PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo.
2. Bagaimanakah analisis dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak gugatan kumulasi Penggugat Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Bersama dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo ditinjau dari Hukum Perceraian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Metode Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).

### **B. Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Gugatan Yang Dilakukan Oleh Penggugat Dalam Putusan Perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo.**

Pada Perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo terjadi perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang semula hanya gugatan perceraian, akan tetapi kemudian berubah menjadi kumulasi gugatan yaitu gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.

Menurut Sudikno<sup>2</sup> suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan tergugat, karena dengan perubahan itu tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat. Oleh karena itu bagi tergugat akan lebih menguntungkan apabila tidak diadakan perubahan gugatan, sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat.

Pasal 127 RV Pasal 127 mengatur tentang perubahan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi

---

<sup>1</sup>Kaidah-Kaidah Hukum-Yurisprudensi

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas IA, (<http://www.pa-jakartapusat.go.id>), diakses tanggal 4 Juli 2014

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, 1998. **Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Kelima)**. Yogyakarta: Liberty. hal. 82

tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

HIR tidak mengatur tentang perubahan gugatan ini. Meskipun demikian mengingat akan peranan hakim itu aktif menurut sistim HIR, maka ia dapat mengizinkan perubahan tuntutan, asal perubahan itu tidak jauh menyimpang dari kejadian materiil, posita yang menjadi dasar tuntutan. Asal tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri, maka penggugat boleh mengadakan perubahan gugatan.<sup>3</sup>

Ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur tentang Perubahan Gugatan. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung itu akan penulis uraikan di dalam penulisan skripsi ini. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976: Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Dari Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 dapat diuraikan bahwa perubahan atau tambahan dari gugatan diperbolehkan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan juga tidak merugikan kepentingan tergugat.

Yurisprudensi yang kedua adalah Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971: Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair: “untuk peradilan yang adil”. Pada yurisprudensi Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 tersebut dinyatakan dibolehkannya perubahan gugatan asal tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan.

---

<sup>3</sup>*ibid.* hal. 83



Yurisprudensi ketiga adalah Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991: Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perusahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut. Dari yurisprudensi ini membolehkan perubahan gugatan asalkan Gugatan belum dibacakan dan Tergugat belum diperintahkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjawab gugatan.

Yurisprudensi keempat ialah Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970: Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan. Dilihat dari yurisprudensi ini memungkinkan untuk melakukan perubahan gugatan asalkan perubahan gugatan tersebut tidak melampaui proses jawab-jawab antara penggugat dan tergugat serta belum melampaui pembuktian.

Menurut Maria Amanda<sup>4</sup> terdapat beberapa pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu:

1. Sampai saat perkara diputus

Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv. Pasal 127 Rv mengatur bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Jangka waktu ini dianggap terlalu memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan perubahan gugatan dan dianggap sebagai kesewenang-wenangan terhadap tergugat.

2. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama

Buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ("MA") menegaskan bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat

---

<sup>4</sup>Maria Amanda, **PerubahanGugatan**,  
(<http://www.hukumacaraperdata.com/perubahan-gugatan-2/#more-185>, diakses Tanggal 10 November 2014)

dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan. Jangka waktu dalam buku pedoman MA ini dianggap terlalu resriktif karena hanya memberikan waktu pada hari sidang pertama.

### 3. Sampai pada tahap replik-duplik

Batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Dalam praktiknya, peradilan cenderung menerapkan batasan jangka waktu perubahan gugatan ini, contohnya dalam Putusan MA No.546 K/Sep/1970.

Pasal 127 Rv tidak mengatur mengenai syarat formil pengajuan perubahan gugatan. Tetapi persyaratan formil perubahan gugatan dimuat di dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh MA. Persyaratan formil perubahan gugatan adalah:<sup>5</sup>

#### 1. Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat

Pengajuan perubahan gugatan diajukan pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak. Syarat ini demi melindungi kepentingan tergugat untuk membela diri.

#### 2. Memberi hak kepada tergugat menanggapi

Buku pedoman MA ini mengatur bahwa perihal perubahan gugatan diberitahukan kepada tergugat dan memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

#### 3. Tidak menghambat acara pemeriksaan

Perubahan gugatan boleh dilakukan oleh penggugat selama tidak menghambat acara pemeriksaan perkara.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan kepada penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Prof.Subekti<sup>6</sup> mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil.” Pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan. Putusan pengadilan memberikan batasan mengenai perubahan gugatan. Batasan-batasan tersebut antara lain perubahan gugatan tidak boleh mengubah materi pokok perkara, perubahan gugatan tidak bersifat prinsipil, perubahan tanggal yang tidak dianggap merugikan kepentingan tergugat, tidak merubah posita gugatan, dan pengurangan gugatan tidak merugikan tergugat.

Bagaimana dengan Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat di dalam Perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo. Perubahan Gugatan Penggugat dalam Perkara Perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo diajukan pada waktu sidang pertama yang dihadiri oleh Tergugat, dianalisis secara batas waktu perubahan gugatan menurut penulis waktu perubahan gugatannya sudah tepat sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga perubahan gugatan tersebut tidak lampau waktu. Hakim juga memberi hak kepada Tergugat untuk menanggapi gugatan penggugat, Tergugat menanggapi dengan melakukan Eksepsi.

Terkait dengan isi perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ada perbedaan dari materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan.

Dilihat dari Perubahan Gugatan tersebut ada tiga pokok materi gugatan di dalam perubahan gugatan tersebut yaitu gugatan perceraian, gugatan Hak Asuh anak dan Gugatan tentang Pembagian Harta Bersama yang dikuasai oleh

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Tergugat, pada gugatan semula hanyalah berkaitan dengan Cerai Gugat. Maka dari perubahan gugatan tersebut ada penambahan pokok gugatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 RV, yang mana di dalam Pasal 127 RV adalah Hak penggugat untuk merubah gugatannya tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

**C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Kumulasi Penggugat Tentang Perceraian, Pembagian Harta Bersama Dan Penguasaan Dalam Putusan Perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit Di Pengadilan Agama Situbondo.**

Putusan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit merupakan bentuk putusan Konstitutif. Dasar-dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam memutus Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit:

1. Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2010 dengan alasan yang pada intinya menolak tegas perbaikan gugatan Penggugat tersebut karena telah menyalahi ketentuan *prosedur* hukum acara yang berlaku dan telah salah memahami penafsiran para ahli hukum dengan menyitir pendapat pakar hukum dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang Tergugat kemukakan dalam duduk perkara.
2. Majelis Hakim berpendapat *eksepsi* Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima dan menyatakan surat perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).
3. Oleh karena surat perbaikan gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sedangkan gugatan asal tidak dicabut oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat yang berlaku adalah gugatan asal (gugatan pertama).

Dengan diterimanya eksepsi Tergugat yang keberatan terhadap Perubahan Gugatan dan majelis hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sedangkan gugatan asal tidak dicabut oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat yang berlaku adalah

gugatan asal (gugatan pertama) menyebabkan Gugatan tentang Harta Bersama dan Penguasaan tentu saja juga tidak dapat diterima, karena yang dilakukan pemeriksaan tentu saja Gugatan yang pertama.

Mengenai hal ini Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang merupakan yurisprudensi secara nyata telah mengatur persoalan perubahan gugatan. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 itu berbunyi sebagai berikut: “Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.”

Dari Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 menjadi semakin jelas mana-mana saja perubahan gugatan yang dilarang dan yang dibolehkan:

1. Perubahan gugatan dilarang ketika perubahan gugatan tersebut merubah posita, apabila tidak merubah posita tentu saja dibolehkan perubahan gugatan tersebut.
2. Perubahan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri.

Senada dengan Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, menurut Subekti yang dikutip oleh Roihan A. Rasyid<sup>7</sup> perubahan gugat dilarang bila penggugat mengemukakan hal/keadaan baru sehingga yang dimohonkan kepada hakim sama sekali lain daripada yang semula.

Roihan A. Rasyid<sup>8</sup> menyimpulkan tentang hal tersebut sebagai berikut:

- a. Perubahan atau penambahan gugatan, sepanjang bukan mengemukakan hal/tuntutan baru yang sama sekali lain daripada yang semula, pada prinsipnya diperkenankan, dengan syarat dengan persetujuan majelis hakim. Jika tergugat sudah menjawab, juga ditambah dengan persetujuan tergugat.
- b. Perubahan atau penambahan gugatan yang sama sekali lain daripada yang semula, yang merupakan hal/tuntutan baru sama sekali, tidak diperkenankan.

---

<sup>7</sup>Roihan A. Rosyid. 2013. **Hukum Acara Peradilan Agama: Edisi Baru (Cet. 15)**. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hal. 121

<sup>8</sup>*Ibid.*

- c. Majelis hakim dalam mempertimbangkan boleh atau tidaknya adalah dengan melihat kasus demi kasus.

Namun berbicara Penggabungan Gugatan di dalam perkara perceraian dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memungkinkan untuk dilakukannya penggabungan gugatan di dalam gugatan Perceraian. Perkara-perkara yang dapat digabung dengan perkara perceraian di dalam gugatan perceraian menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Sehingga apabila gugatan perceraian, pembagian harta bersama dan penguasannya serta hak asuh anak di dalam Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit diajukan bebarengan pada Gugatan awal bukan pada perubahan gugatan tentu saja akan diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit, namun karena penggabungan gugatan tentang perceraian, pembagian harta bersama dan penguasannya serta hak asuh anak di dalam Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit diajukan pada saat perubahan gugatan, apalagi ketiga pokok perkara itu merupakan hal yang berbeda satu sama lain, maka tentu saja itu memberatkan kepentingan tergugat apalagi hal itu merubah posita dari gugatan semula.

Dalam Pasal 86 ayat (1) tersebut menurut Marjohan Syam<sup>9</sup> membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasi dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (reconventie), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, nah dengan demikian masalah perceraian terbawa oleh Pasal yang membolehkannya, **sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.**

---

<sup>9</sup>Marjohan Syam, **Makalah: Pasal 86 Ayat (1) Penyebab Lamanya Perkara Perceraian (Kendala Peraturan Perundang-Undangan)**. Pengadilan Tinggi Riau. Tanpa Tahun

PadaprinsipnyapembuatUndang-

Undangmemangbermaksuduntukmemeliharadanmenjagakepentinganwanitadengana  
nadanyaPasaltersebut, karenabilawanita yang mengajukangugatceraiautau sang  
suamimemohonceraitalak, makabiasanyapenguasaanhartabersama yang  
lebihdominanadalahlaki-laki, artinyadalamperceraianwanita yang  
banyakdirugikan, karenaitulahdiantisipasidengandibukanyakumulasi  
(penggabungan)  
gugatanhartabersamadengangugatanperceraianataugugatbaliktersebut.<sup>10</sup>

Persoalan Penggabungan Gugatan juga diatur di dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, adapun pokok-pokok penggabungan Gugatan yang diatur di dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972 adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G);
2. Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti : Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW;

Yurisprudensi yang lainnya yaitu Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975 mengatur tentang pemeriksaan perkara penggabungan gugatan, adapun sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Hakim pertama ke 3 buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/ 1968/Mkl;

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

2. Bahwa ke 3 gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg. (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang ditinjau dari segi acara (*processuel doemartig*);

Namun ada yurisprudensi yang justru melarang adanya penggabungan gugatan seperti pada Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972, dengan bunyi sebagai berikut:

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain; Misalnya: Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkerecht); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.”

Penggabungan (kumulasi) gugatan perceraian dan pembagian serta penguasaan harta bersama di dalam Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit menurut penulis merupakan bentuk efisiensi dari perkara perceraian, penggabungan gugatan menurut penulis untuk menerapkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena makna yang terkandung di dalam Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. Pendapat penulis ini didasarkan pada pendapat Artidjo Arkostar<sup>11</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

“Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan , mengandung makna peradilan harus membuka **ruang** lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara social-politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.”

---

<sup>11</sup>ArtidjoAlkostar.*Independensi Dan Akuntabilitas.* MakalahDisampaikandalamPemerkuatanPemahamanHakAsasiManusiaUntuk Hakim Sleuruh Indonesia yang diselenggarakanolehKomisiYudisial-PUSHAM UII-Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei 2012.hal. 1



Tujuan diterapkannya kumulasi gugat menurut Soepomo<sup>12</sup> adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Abdul Manan<sup>13</sup> melihat bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Samsul Bahri<sup>14</sup> berpendapat lain tentang Penggabungan Gugatan antara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama, uraiannya sebagai berikut:

“Menunda keadilan sama halnya dengan menolak keadilan (*justice delayed justice denied*). Maksudnya menunda keadilan yang seharusnya sudah dapat dinikmati sekarang kemudian ditunda tidak ada bedanya dengan menolak keadilan itu. Bahkan sampai batas tertentu, menunda keadilan merupakan tindakan dzalim. Betapa tidak, keadilan adalah hak dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun. Tanpa sadar aparat pengadilan agama sering melakukan penundaan keadilan yang seharusnya dapat dinikmati para pihak saat ini. Akan tetapi hanya karena hal yang bersifat prosedural, hakim pengadilan agama menunda memberikan keadilan. Seperti diketahui sebagian besar perkara yang diperiksa hakim pengadilan agama adalah masalah hukum keluarga, utamanya sengketa perkawinan (baca: perceraian). Dalam gugatan perceraian ini tidak jarang dikumulasikan dengan atau diajukan rekonvensi mengenai harta bersama atau tuntutan kebendaan lainnya. Harus diakui bahwa hampir semua sengketa perceraian sebenarnya sudah dapat diputus dikabulkan. Akan tetapi adanya sengketa harta bersama menyebabkan perceraian yang sebenarnya final menjadi tergantung karena adanya upaya hukum. Keadilan mengenai perceraian sebenarnya sudah dapat diberikan kepada para pihak, tetapi kemudian ditunda. Dus hakim pengadilan agama telah menolak keadilan yang telah dibuatnya sendiri.”

Namun kembali pada persoalan di dalam Perkara Nomor: 1137/Pdt.G/2010/Pa.Sit tentang kapan penggabungan gugatan dilakukan yaitu di dalam perubahan gugatan, yang pada awalnya gugatan tersebut hanya sebatas perceraian sementara itu pada perubahan gugatannya menjadi gugatan perceraian dan pembagian serta penguasaan harta bersama sehingga hal ini membuat

---

<sup>12</sup> R. Soepomo.2005. **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Jakarta: Pradnya Paramita, hal.29

<sup>13</sup> Abdul Manan, 2000. **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. hal.27

<sup>14</sup> Samsul Bahri. **Justice Delayed Justice Denied**, (<http://badilag.net/data/ARTIKEL/JUSTICE%20DELAYED.pdf>, diakses tanggal 2 November 2014)

positanya berubah dan sudah berkenaan dengan materi perkara, maka tentu saja dasar pertimbangan hakim untuk menerima eksepsi Tergugat adalah sudah sangat tepat, apalagi sudah dijelaskan di atas baik yang diatur di dalam pasal 127 Rv, maupun pendapat-pendapat para ahli serta beberapa yurisprudensi yang pada intinya menyatakan perubahan gugatan boleh dilakukan asalkan tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Apalagi perkara perceraian dan pembagian harta bersama merupakan substansi yang berbeda, sehingga seharusnya menjadi kejelian Penggugat atau kuasa hukumnya untuk memasukkan gugatan penguasaan dan pembagian harta bersama di awal pengajuan gugatan bukan pada perubahan gugatan. Tentang perkara perceraian dan pembagian harta bersama merupakan substansi yang berbeda ini menurut Samsul Bahri<sup>15</sup> dapat dilihat sebagai berikut:

“Peceraian adalah sengketa mengenai status orang (*personen rechts*) dan sengketa harta bersama benda (*zaken rechts*). Antara perceraian dan harta bersama dalam semua aspeknya, tidaklah dapat disamakan. Perceraian menyangkut pribadi manusia yang adalah makhluk hidup mempunyai rasa dan rasio, sifat dan respon terhadap dirinya. Kejelasan status orang melalui perceraian akan mempengaruhi rasa dan rasionya yang akan tercermin melalui sifat dan perilakunya. Orang yang sudah jelas statusnya dapat segera menentukan sikap atas statusnya itu akan menikah lagi atau justeru ingin tetap melajang. Status yang tidak jelas dalam jangka waktu lama akibat perkaranya tergantung dalam upaya hukum, akan membawa dampak sosio-psikologis yang relatif berat. Ia jadi janda/duda bukan karena belum cerai, jadi isteri/suami juga bukan karena tidak bersatu lagi. Sementara harta bersama apabila lama dalam status quo tidaklah akan menanggung risiko sebagaimana manusia. Bahkan dari sisi komersial, harta bersama yang berupa barang tidak bergerak nilainya akan semakin tinggi.”

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

1. Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sitdi Pengadilan Agama Situbondo dari perubahan gugatan tersebut ada penambahan pokok gugatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 RV, yang mana di dalam Pasal 127 RV adalah Hak penggugat untuk merubah gugatannya tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak gugatan kumulasi Penggugat Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Bersama dalam putusan perkara Nomor 1137/Pdt.G/2010/PA.Sitdi Pengadilan Agama Situbondo ditinjau dari Hukum Perceraian sudah sangat tepat karena penggabungan gugatan dilakukan yaitu di dalam perubahan gugatan, yang pada awalnya gugatan tersebut hanya sebatas perceraian sementara itu pada perubahan gugatannya menjadi gugatan perceraian dan pembagian serta penguasaan harta bersama sehingga hal ini membuat positanya berubah dan sudah berkenaan dengan materi perkara, maka tentu saja dasar pertimbangan hakim untuk menerima eksepsi Tergugat adalah sudah sangat tepat, apalagi sudah dijelaskan di atas baik yang diatur di dalam pasal 127 Rv, maupun pendapat-pendapat para ahli serta beberapa yurisprudensi yang pada intinya menyatakan perubahan gugatan boleh dilakukan asalkan tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

## **B. Saran**

Saran yang bisa penulis berikan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap orang ketika akan membuat gugatan lebih teliti dan lebih jeli lagi sehingga tidak melewatkan hal-hal yang krusial dalam gugatan tersebut, sehingga nantinya tidak lahir putusan tentang gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Hendaknya Hakim Pengadilan Agama tidak lagi melakukan Justice Delayed Justice Denied dalam perkara perceraian agar asa Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1993. **HukumPerdata Indonesia**. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Abdul Manan, 2000. **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Artidjo Alkostar.*Independensi Dan Akuntabilitas*. Makalah Disampaikan dalam Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Sleuruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII-Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei 2012.
- BambangSugeng AS danSujayadi, 2012.**PengantarHukumAcaraPerdatadanContohDokumenLitigasi**.Ja karta: KencanaPrenada Media Group.
- Bambang Sunggono, 1996,**Metode Penelitian Hukum**, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- J. Andy Harianto. 2012, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan**,Yogyakarta:Laksbang Grafika
- Ko Tjay Sing. 1981. **Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga**. Semarang : Itikad Baik.
- M. Yahya Harahap . 2005. **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan**. Jakarta: Sinar Grafika
- Marjohan Syam, **Makalah: Pasal 86 Ayat (1) Penyebab Lamanya Perkara Perceraian (Kendala Peraturan Perundang-Undangan)**. Pengadilan Tinggi Riau. Tanpa Tahun
- Moh. Taufik Makarao. 2004. **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Cet. I**. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Muhammad Syaifuddin,et. al. 2012.**Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia**, Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- , 2013.**HukumPerceraian**. Jakarta: SinarGrafika
- Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, tanpa tahun. **Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah**,Surabaya: Al Hidayah
- R. Soepomo.2005. **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Jakarta: Pradnya Paramita
- RetnoWulanSutantiodanIskandarOeripkartawinata.2009.**HukumAcaraPerdataD alamTeoridanPraktek (Cet. XI)**. Bandung: MandarMaju.
- Roihan A. Rasjid, 2013. **HukumAcaraPeradilan Agama (EdisiBaru)**, Jakarta: RajawaliPers
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Semarang: Ghalia Indonesia
- SayutiThalib. 1986. **HukumKekeluargaanIndonesiag: BerlakuBagiUmatIslm (Cet. Ke-5)**. Jakarta:UI-Press.
- Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta:UI-Press

- Subekti. 2001. **Pokok-pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1998. **Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Kelima)**. Yogyakarta: Liberty
- , 2002, **Hukum Acara Perdata Indonesia (cetakan keenam)**, Yogyakarta: Liberty
- , 2010. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Titon Slamet Kurnia, 2009. **Pengantar Sistem Hukum Indonesia**, Bandung : Alumni
- Wahyu Ernang Sihdan Putu Sumawati, 2006. **Hukum Perkawinan Indonesia**, Palembang: Rambang Palembang
- Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22)
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975
- Internet:**
- Samsul Bahri. **Justice Delayed Justice Denied**,  
(<http://badilag.net/data/ARTIKEL/JUSTICE%20DELAYED.pdf>, diakses tanggal 2 November 2014)
- Maria Amanda, **Perubahan Gugatan**,  
(<http://www.hukumacaraperdata.com/perubahan-gugatan-2/#more-185>, diakses Tanggal 10 November 2014)
- Samsul Bahri. **Justice Delayed Justice Denied**,  
(<http://badilag.net/data/ARTIKEL/JUSTICE%20DELAYED.pdf>, diakses tanggal 2 November 2014)
- Zaka Al-Farabi, **Harta Bersama (Gono Gini) Hukum Perdata**.  
(<http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html>, diakses tanggal 2 November 2014)